

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ESELON IV)  
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BARITO KUALA**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ESELON IV)	BIDANG URUSAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
Mengembangkan peran koperasi, UMKM sebagai pelopor pemasar produk olahan dan kerajinan	Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah peserta rapat koordinasi yang memahami kebijakan program pengembangan koperasi	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah peserta rapat yang di pre test / pas test	Peserta yang hadir	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala APBD Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
		Jumlah pengelola koperasi yang memahami prinsip-prinsip perkoperasian	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah peserta sosialisasi yang di pre test / pas test	Peserta yang hadir	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala APBD Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
		Jumlah pengelola koperasi peserta bimtek yang memahami administrasi usaha koperasi	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah peserta bimtek yang di pre test / pas test	Peserta yang hadir	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala APBD Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
		Jumlah peserta bimtek akutansi koperasi yang mampu membuat laporan keuangan koperasi	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah peserta bimtek yang di pre test / pas test	Peserta yang hadir	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala APBD Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

		Jumlah pengelola koperasi peserta bimtek yang memahami tupoksi perangkat organisasi koperasi	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah peserta bimtek yang di pre test / pas test	Jumlah yang hadir	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala APBD Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
		Jumlah koperasi yang menerima penghargaan	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang diverifikasi / dinilai	Jumlah koperasi yang RAT	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala APBD Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
		Jumlah usaha mikro peserta yang mampu mengembangkan permodalan dan usahanya	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Hasil moneva dan laporan UMKM	Keragaan UMKM	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala APBD Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
		Jumlah usaha mikro yang dikembangkan permodalan dan usahanya	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Hasil moneva dan laporan UMKM	Keragaan UMKM	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala APBD Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
		Jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki jiwa kewirausahaan	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah peserta Sosialisasi Kewirausahaan yang di pre test / pas test	Jumlah yang hadir	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala APBD Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
		Jumlah Pengadaan sarana pemasaran bagi usaha mikro	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah sarana pemasaran	Realisasi Bangunan	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala APBD Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Mengembangkan Kewirausahaan masyarakat berbasis potensi lokal	Meningkatnya IKM dalam perekonomian masyarakat	Jumlah jaringan klaster industri	Bidang Perindustrian	Jumlah klaster yang dibentuk		Undang – undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
		Jumlah sentra yang dibina	Bidang Perindustrian	$\frac{\text{Jumlah sentra dibina}}{\text{Jumlah sentra}} \times 100$		Undang – undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

		Jumlah penyusunan kebijakan industri	Bidang Perindustrian	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dibuat}}{\text{Jumlah dokumen}} \times 100$		Undang – undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
		Jumlah pameran/promosi kerajinan	Bidang Perindustrian	$\frac{\text{Jumlah pameran yang diikuti}}{\text{Jumlah pameran}} \times 100$		Keputusan Menteri Perindustrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85/M/SK/3/1980 dan Nomor 027b/P/1980 tentang Dekranas
		Jumlah produk inovasi kerajinan	Bidang Perindustrian	$\frac{\text{Jumlah produk yang dibuat}}{\text{Jumlah produk yang ada}} \times 100$		Undang – undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Peningkatan kualitas Pasar Daerah dan Pasar Desa	Meningkatnya Sarana distribusi Perdagangan	Jumlah revitalisasi pasar tradisional	Bidang Perdagangan	Pasar tradisional yang direvitalisasi	Data Teknis Pasar	Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar
		Jumlah PKL dan Asongan yang ditata	Bidang Perdagangan	Peserta Sosialisasi yang memahami kebijakan PKL dan Asongan	Data PKL	Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
		Jumlah barang ( gabah ) yang diresi gudangkan	Bidang Perdagangan	Resi gudang yang diterbitkan	Laporan Resi Gudang	Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang SRG
		Jumlah pameran dan promosi dagang	Bidang Perdagangan	Pemeran yang diikuti	-	Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
		Jumlah kebutuhan bahan pokok yang dimonitor	Bidang Perdagangan	Jumlah kebutuhan bahan pokok	Daftar harga rata-rata bahan pokok	Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
		Jumlah barang / produk tertentu yang diawasi	Bidang Perdagangan	-	- Daftar kios pengecer pupuk - Data pangkalan LPG 3 kg	Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

		Jumlah tindak lanjut terhadap pelanggaran barang bersubsidi	Bidang Perdagangan	Jumlah pelanggaran barang bersubsidi	Hasil rapat koordinasi barang bersubsidi	Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
		Jumlah konsumen yang cerdas (memahami hak dan kewajiban)	Bidang Perdagangan	Hasil post test sosialisasi perlindungan konsumen	Rekapitalisasi hasil post test	Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
		Prosentase alat UTTP yang ditera/tera ulang	Bidang Perdagangan	$\frac{\text{Jumlah UTTP yang di Tera Ulang}}{\text{Jumlah UTTP}} \times 100$	Data alat UTTP	Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		Jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha	Bidang Perdagangan	Jumlah peserta sosialisasi yang membuat perizinan	Data/Laporan DPMPTSP	Surat edaran Kementerian Perdagangan RI Nomor 02/M-DAG/SE/2/2017 tentang kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dibidang perdagangan.

**KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BARITO KUALA**

**H. PURKAN, SH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650103 199203 1 010